

Di Kirimkan, Januari 2021
Diterim, Maret 2021

PENGUATAN TATA KELOLA BUMDes
Di KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

¹Suwito

²Muhammad Kamal

^{1,2} Universitas Khairun

Jl. Jusuf Abdulrahman, Ternate Selatan 97719

¹ suwito.s3.pdia@gmail.com

Abstrak

PPM Penguatan Kapasitas Pengelola BUMDes ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam menciptakan produk BUMDes yang berdaya saing tinggi; dan mewujudkan tata kelola keuangan BUMDes yang efektif dan efisien. Kemampuan Pengelola BUMDes ini diharapkan dapat mendorong percepatan kemandirian dan penciptaan kesejahteraan masyarakat.

Pengelola BUMDes yang menjadi sasaran dalam kegiatan PPM ini adalah Direktur BUMDes, Sekertaris BUMDes, Bendaha BUMDes dan Kepala Divisi Usaha BUMDes yang berjumlah 20 orang. PPM pengelolaan BUMDes ini dilakukan dengan metode ceramah, demonstrasi dan latihan yang disertai tanya jawab. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan konsep pengantar dan teori pengelolaan BUMDes. Metode demonstrasi dipakai untuk menunjukkan suatu proses kerja yaitu tahapan Pengelolaan BUMDes dalam menciptakan produk BUMDes yang berdaya saing tinggi; dan mewujudkan tata kelola keuangan BUMDes yang efektif dan efisien. Sementara metode tanya jawab untuk memberi kesempatan para peserta berkonsultasi dalam mengatasi kendala dalam pengelolaan BUMDes.

Ketersediaan tenaga ahli yang memadai dalam pengelolaan BUMDes di Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun, antusiasme peserta, dukungan Pemerintah Desa Ulo dan BPMD Halamaheara Barat terhadap pelaksanaan kegiatan dan dana pendukung dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis merupakan pendukung terlaksananya kegiatan PPM ini. Adapun kendala yang dihadapi adalah banyaknya Pengelola BUMDes yang belum memiliki pengetahuan awal tentang pengelolaan BUMDes dan keterbatasan waktu untuk PPM.

Manfaat yang dapat diperoleh peserta dari kegiatan PPM ini antara lain dapat menyusun perencanaan Bisnis dan keuangan BUMDes sesuai mata PPM yang diampu. Model Pengelolaan BUMDes yang diperoleh diharapkan dari PPM ini dapat meningkatkan Kapasitas Pengelola BUMDes dalam melakukan Pengelolaan BUMDes.

Keyword : Peningkatan Kapasitas, Pengelola BUMDes, Ceramah dan Demontrasi



1. PENDAHULUAN

Bagi desa lahirnya Undang-undang No. 6 tahun 2014 (UU No.6 tahun 2014), esensinya merupakan kebijakan strategis Negara yang dihadirkan untuk mendukung penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Ini berarti dalam melaksanakan baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan maupun pemberdayaan masyarakat Desa harus dilaksanakan dengan prinsip akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (pasal 26 ayat 4 huruf f, UU No.6 tahun 2014). Dengan konsep tersebut diyakini potensi percepatan kemandirian dan penciptaan kesejahteraan masyarakat desa dapat dicapai dengan optimal. Namun demikian untuk mewujudkan kondisi tersebut syarat utama adalah pertama, terwujudnya *good vilage governance* yaitu pengelolaan keuangan desa yang dilakukan dengan transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; kedua, mendorong tubuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) desa serta mendorong BUMDes mengelola potensi desa dengan profesional, efisien, efektif, bertanggung jawab dalam bingkai *social entrepreneurship*. Ketiga, tersedianya sumber daya manusia (SDM) desa dan BUMDes yang kompeten dan professional di bidang pengelolaan keuangan dan SDA Desa.

Justifikasi terkait hal ini adalah suksesnya optimalisasi percepatan kemandirian dan penciptaan kesejahteraan masyarakat desa tergantung pada ketersediaan fasilitas kelembagaan desa dan SDM Desa. Fasilitas kelembagaan desa berhubungan dengan pendirian, penguatan dan pengembangan Lembaga bisnis desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa untuk kemandirian dan Kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan SDM Desa berhubungan dengan



penguatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalitas aparatur desa pengelola keuangan desa dan pengelola BUMDes untuk mencapai profitabilitas humanis.

Merujuk pada uraian di atas, topik utama yang menarik untuk dikerjakan saat ini adalah topik yang berhubungan dengan BUMDes. Hal ini lebih karena BUMDes dapat menjadi instrument yang memberi kontribusi besar terhadap Desa dalam mewujudkan percepatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa. Selain argumentasi tersebut argumentasi yang lain adalah BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Tujuannya adalah meningkatkan perekonomian desa; mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; meningkatkan usaha masyarakat desa dalam pengelolaan potensi desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat desa; membuka lapangan kerja untuk masyarakat desa; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Di titik ini pemerintah Desa memiliki peluang yang sangat besar untuk melakukan percepatan kemandirian keuangan desa. Hal ini lebih karena BUMDes menjadi unit bisnis Pemerintah Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Selain itu, BUMDes merupakan Lembaga strategis penggerak ekonomi desa untuk peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat desa. Ini artinya BUMDes adalah Lembaga strategis yang dilahirkan desa dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi masyarakat desa. Untuk mewujudkan hal ini ada tiga prinsip mendasar yang



harus di terapkan oleh BUMDes yakni pertama, menciptakan manfaat untuk banyak orang dan menyelesaikan persoalan-persoalan sosial ekonomi masyarakat desa. Kedua, menstimulasi perubahan-perubahan di dalam masyarakat desa dalam berproduksi hingga menciptakan transaksi ekonomis; dan ketiga, menciptakan kesejahteraan dengan menciptakan pendapatan dan pengembangan usaha yang terus menerus tumbuh untuk kemaslahatan masyarakat desa.

Sampai di sini jelas BUMDes memiliki makna yang esensial bagi penyelenggaraan Pemerintahan desa diantaranya adalah 1) BUMDes menjadi langkah strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi Negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa; 2) BUMDes menjadi langkah strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif; 3) BUMDes menjadi langkah strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa; 4) BUMDes menjadi strategi mewujudkan kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa; 5) BUMDes merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa; 6) BUMDes menjadi arena pembelajaran bagi warga Desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola Desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif; dan 7) BUMDes menjadi instrumen transformasi program yang diinisiasi oleh pemerintah (*government driven*; proyek pemerintah) menjadi “milik Desa”.

Atas pertimbangan tersebut, kami bermaksud akan melakukan pengabdian terkait dengan Penguatan Tata Kelola BUMDes yang terdiri dari Penguatan Manajemen SDM BUMDes, Manajemen Pemasaran Produk BUMDes; Manajemen Keuangan BUMDes dan Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes



serta penguatan kompetensi dan profesionalitas dalam penciptaan *social entrepreneurship* dan profitabilitas BUMDes

a. Masalah PPM

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan dalam PPM ini adalah Bagaimana Pengelolaan BUMDes yang Profesional dalam Pengelolaan Bisnis dan Keuangan BUMDes.

b. Maksud Dan Tujuan PPM

Maksud PPM penguatan tata Kelola BUMDes adalah mendorong percepatan kemandirian dan penciptaan kesejahteraan masyarakat desa. Sementara Tujuan Pengabdian Penguatan manajemen SDM BUMDes, adalah

1. Menyukkseskan amanat pasal 87 ayat 1 UU No 6 Tahun 2014 tentang pendirian BUMDes di Desa;
2. Mewujudkan tata kelola BUMDes yang baik “Good BUMDes Governance”;
3. Menciptakan produk BUMDes yang berdaya saing tinggi;
4. Mewujudkan tata kelola keuangan BUMDes yang efektif dan efisien;

c. Sasaran PPM

Masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan PPM Pengelolaan BUMDes dalam rangka Peningkatan kapasitas pengelola BUMDes adalah Direktur BUMDes, Sekertaris BUMDes, Bendahara BUMDes dan Kepala Devisi Bisnis BUMDes di Wilayah Kecamatan Jailolo jumlah Pengelola BUMDes sasaran sebanyak 20 Orang. Adapun yang menjadi instruktur dan narasumber dalam kegiatan ini adalah dosen-dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate yang memiliki Kompetensi di Bidang Pengelolaan BUMDes.

d. Kontribusi PPM

Manfaat Kegiatan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang dilakukan oleh Prodi Akuntansi melalui Tim PPM pengelolaan keuangan Desa ini adalah sebagai berikut:



1. Secara Teoritis, Kegiatan PPM ini memberi kontribusi terhadap Pengembangan BUMDes.
2. Secara Praktis, Kegiatan PPM ini memberikan Kontribusi pada terciptanya Kapasitas Pengelola BUMDes yang memadai dalam pengelolaan bisnis dan keuangan BUMDes.

2. METODE PELAKSANAAN

Untuk memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi dan dirumuskan tersebut di atas dan agar PPM dapat berjalan dengan lancar, maka sebagai alternatif pemecahan masalah adalah sebagai berikut: PPM dilakukan dengan pendekatan individual dan klasikal. Pendekatan klasikal dilakukan pada saat pemberian teori tentang pengelolaan keuangan Desa dan pendekatan individual dilakukan pada saat latihan pengelolaan Bisnis dan Keuangan BUMDes. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Ceramah Bervariasi.

Metode ini dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep yang penting untuk dimengerti dan dikuasai oleh peserta PPM. Penggunaan metode ini dengan pertimbangan bahwa metode ceramah yang dikombinasikan dengan contoh-contoh yang dapat memberikan kemudahan pada Peserta PPM untuk memahami cepat dan mudah. Materi yang diberikan meliputi:

- a. Overview Pengembangan BUMDes
- b. Filosofi BUMDes
- c. Penguatan Kelembagaan BUMDes
- d. Pemetaan Potensi Desa
- e. Studi Kelayakan Bisnis BUMDes
- f. Penatausahaan Keuangan BUMDes
- g. Pengelolaan Aset BUMDes

2. Demonstrasi

Metode ini dipilih untuk menunjukkan suatu proses kerja yaitu tahap-tahap pengelolaan BUMDes. Demonstrasi dilakukan oleh instruktur di hadapan peserta sehingga



peserta dapat mengamati secara langsung metode dan teknik Pengelolaan BUMDes yang berdaya saing tinggi.

3. Latihan

Metode ini digunakan untuk memberikan tugas kepada peserta PPM untuk mempraktikkan Pengelolaan BUMDes yang berdaya saing tinggi.

a. Langkah-Langkah Pelaksanaan PPM

Adapun langkah-langkah kegiatan yang dilakukan adalah PPM secara intensif dengan tahapan sebagai berikut:

1. Ceramah tentang pengantar, teori dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :
 - a. Overview Pengembangan BUMDes
 - b. Filosofi BUMDes
 - c. Penguatan Kelembagaan BUMDes
 - d. Pemetaan Potensi Desa
 - e. Studi Kelayakan Bisnis BUMDes
 - f. Penatausahaan Keuangan BUMDes
 - g. Pengelolaan Aset BUMDes
2. Demonstrasi tentang langkah-langkah Pengelolaan BUMDes yang berdaya Saing Tinggi.
3. Latihan Survey Potensi Desa, Studi Kelayakan Bisnis BUMDes dan Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes
4. Evaluasi hasil Survey Potensi Desa, Studi Kelayakan Bisnis BUMDes dan Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Pelaksanaan PPM

Kegiatan PPM yang dilaksanakan dengan acara tatap muka dan PPM pengelolaan BUMDes berjalan dengan baik dan lancar. Pertemuan tatap muka dengan metode ceramah dan demonstrasi, dilanjutkan latihan/praktek untuk membuat Pemetaan Potensi Desa, Studi Kelayakan Bisnis BUMDes dan Pengelolaan Keuangan BUMDes. Kegiatan ini dilaksanakan tiga hari yaitu pada hari Kamis-Sabtu, tanggal 20-22 Agustus 2020 dari pukul 07.30-17.00



- Filosofi BUMDes
- Penguatan Kelembagaan BUMDes
- Pemetaan Potensi Desa
- Studi Kelayakan Bisnis BUMDes
- Penatausahaan Keuangan BUMDes
- Pengelolaan Aset BUMDes

Program pengabdian pada masyarakat berupa PPM Peningkatan kapasitas Pengelola BUMDes yang sudah dilaksanakan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan meningkatkan kepercayaan diri Pengelola BUMDes dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Hasil PPM ini akan bermanfaat bagi BUMDes dalam menjalankan Bisnis BUMDes terutama dalam Penyusunan Rencana Bisnis BUMDes. Disamping itu dengan adanya PPM Pengelolaan BUMDes ini akan menambah keterampilan Pengelola BUMDes dalam menyiapkan dokumen Rencana Bisnis BUMDes sehingga akan mendukung kemampuan pengelola BUMDes dalam mewujudkan BUMDes yang berdaya saing tinggi.

b. Pembahasan Hasil Pelaksanaan PPM

Hasil kegiatan PPM secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai berikut:

1. Keberhasilan target jumlah peserta BIMTEK
2. Ketercapaian tujuan BIMTEK
3. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan
4. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi

Target peserta pelatihan seperti direncanakan sebelumnya adalah paling tidak 20 Pengelola BUMDes di kecamatan Jailolo. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diikuti oleh 20 orang peserta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa target peserta tercapai 100%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan PPM dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti dapat dikatakan berhasil/sukses. Ketercapaian tujuan BIMTEK Pengelolaan BUMDes secara umum sudah baik, namun keterbatasan waktu yang disediakan



mengakibatkan tidak semua materi tentang Pengelolaan BUMDes dapat disampaikan secara detil. Namun dilihat dari hasil latihan para peserta yaitu meningkatnya pemahaman peserta terkait dengan pengelolaan BUMDes, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan ini dapat tercapai.

Ketercapaian target materi pada kegiatan PPM ini cukup baik, karena materi BIMTEK sebagian besar telah dapat disampaikan. Materi BIMTEK yang telah disampaikan adalah:

- Overview Pengembangan BUMDes
- Filosofi BUMDes
- Penguatan Kelembagaan BUMDes
- Pemetaan Potensi Desa
- Studi Kelayakan Bisnis BUMDes
- Penatausahaan Keuangan BUMDes
- Pengelolaan Aset BUMDes

Kemampuan peserta dilihat dari penguasaan materi masih kurang dikarenakan waktu yang singkat dalam penyampaian materi dan kemampuan para peserta yang berbeda-beda dan secara umum tingkat Strata Pendidikan Pengelola BUMDes berada pada strata SMA. Selain itu, kondisi ini disebabkan jumlah materi yang banyak hanya disampaikan dalam waktu tiga hari, sehingga tidak cukup waktu bagi para peserta untuk memahami dan mempraktekkan secara lengkap semua materi yang diberikan.

Secara keseluruhan kegiatan BIMTEK pengelolaan BUMDes untuk mewujudkan BUMDes yang berdaya saing tinggi ini dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini selain diukur dari keempat komponen di atas, juga dapat dilihat dari kepuasan peserta setelah mengikuti kegiatan. Manfaat yang diperoleh Pengelola BUMDes adalah dapat menyusun perencanaan Bisnis BUMDes dan Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes dengan kualitas yang lebih baik dan diharapkan kualitas tersebut sudah mengikuti standar untuk dapat dipakai sebagai poin dalam penilaian pengelolaan BUMDes yang berdaya saing tinggi.



4. SIMPULAN

Program PPM dalam rangka peningkatan kapasitas pengelola BUMDes terkait dengan Penyusunan Rencana Bisnis BUMDes dan Pengelolaan Keuangan BUMDes dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun meskipun belum semua peserta PPM menguasai dengan baik materi yang disampaikan. Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti PPM dengan tidak meninggalkan tempat sebelum waktu pelatihan berakhir.

5. SARAN

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian perlu ditambah agar tujuan kegiatan dapat tercapai sepenuhnya hal ini tentunya membawa konsekwensi pada peningkatan platform anggaran pengabdian. Oleh karena itu biaya PPM sebaiknya tidak sama antara beberapa tim pengusul proposal, mengingat sasaran yang berbeda pula.
2. Adanya kegiatan lanjutan yang berupa pelatihan sejenis selalu diselenggarakan secara periodic, sehingga dapat meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan di desanya masing-masing



UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pemerintah Kecamatan Jailolo yang telah memberi dukungan terhadap keberhasilan pengabdian ini.
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun yang telah memberikan bantuan dana pengabdian sehingga pengabdian ini bisa terlaksana dengan baik.
3. Adik-adik mahasiswa yang telah membantu pendampingan ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Kessa. 2015. Perencanaan Pembangunan Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.
- Matondang. 2009. Validitas dan Reliabilitas Suatu Instrumen Penelitian. *Jurnal Tabularasa PPS Unimed*. Vol 6 No. 1. Medan.
- Muntahanah, S., dkk.2013. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Bayumas. *Jurnal Purwokwrto*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 1



Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 tentang Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Romantis. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014. Skripsi. Jember.

Santoso. 2011. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Ngawi. Tesis. Surakarta.

Sanusi. 2005. Beberapa Uji Validitas dan reliabilitas pada Instrumen Penelitian. Medan.

Syachbrani. 2012. Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Tesis. Yogyakarta.

Wida. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Siabu Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Skripsi. Jember.

